

ANALISIS KONSEP MERDEKA BELAJAR DALAM PERSPEKTIF PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

Nur Kholila Lubis, Suyanti, Surya Dharma, Sri Yunita

Pascasarjana, Universitas Negeri Medan

Surel: nurkholilalubis98@gmail.com

Abstract: *The aim of this research is to analyze the concept of independent learning from a citizenship education perspective. This research was conducted using a qualitative approach using the literature study method. The data analysis process in this research includes data reduction, data display, verification, and drawing conclusions. The results of this research analyze the concept of independent learning from two perspectives, namely the citizenship education perspective in the curricular dimension and the citizenship education perspective in the socio-cultural dimension. In these two dimensions, it shows the compatibility between the concepts formed in independent learning and the goals of citizenship education. The role of teachers in transformation is the main determinant in the success of the independent curriculum itself. It can be concluded that the concept of an independent curriculum from a citizenship education perspective has correlations and the same goals, where teachers are the center of its success.*

Keyword: *Independent Curriculum, Independent Learning, Citizenship Education.*

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep merdeka belajar dari perspektif Pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi reduksi data, display data, verifikasi, serta penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini, menganalisis konsep merdeka belajar dari dua perspektif, yakni perspektif Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler dan perspektif Pendidikan kewarganegaraan dimensi sosio kultural. Dalam kedua dimensi tersebut, menunjukkan kesesuaian antara konsep yang dibentuk dalam merdeka belajar dengan tujuan Pendidikan kewarganegaraan. Peran guru dalam transformasi menjadi penentu utama dalam keberhasilan kurikulum merdeka itu sendiri. Dapat disimpulkan, konsep kurikulum merdeka dari perspektif Pendidikan kewarganegaraan memiliki korelasi dan kesamaan tujuan, dimana guru menjadi pusat keberhasilannya.

Kata Kunci: Kurikulum Merdeka, Merdeka Belajar, Pendidikan Kewarganegaraan.

Salah satu terobosan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemdikbudristek) ialah merdeka belajar. Kemdikbudristek kerap mengatakan bahwa kebijakan merdeka belajar merupakan langkah transformasi pendidikan di Indonesia. Konsep merdeka belajar menjadi terobosan dalam beberapa kebijakan di dunia pendidikan. Menurut Mendikbud Nadiem Makarim, bahwa “Merdeka Belajar” adalah kemerdekaan berpikir.

Kurikulum merdeka belajar adalah kebijakan baru yang dirancang oleh pemerintah untuk sebuah gebrakan dalam aspek kualitas pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menciptakan peserta didik dan lulusan yang lebih siap menghadapi perkembangan di masa depan. Inti dari merdeka belajar ialah kemerdekaan berpikir pendidik dan peserta didik. Merdeka belajar mendorong terbentuknya karakter jiwa merdeka

dimana pendidikan dan peserta didik dapat secara leluasa dan menyenangkan mengeksplorasi pengetahuan, sikap, dan keterampilan dari lingkungan. Merdeka belajar dapat mendorong siswa belajar dan mengembangkan dirinya, membentuk sikap peduli terhadap lingkungan di mana siswa belajar, mendorong kepercayaan diri dan keterampilan siswa serta mudah beradaptasi dengan lingkungan masyarakat (Ainia, 2020).

Kebijakan dengan tujuan pembaharuan perlu sebuah respon dan kajian dari berbagai sudut pandang, agar tidak menciptakan krisis multidimensional. Terlebih kebijakan ini berkaitan dengan pendidikan yang merupakan inti dari persiapan sumber daya manusia (SDM). Dengan orientasi untuk mengetahui relevannya kebijakan tersebut dalam mencapai tujuan pendidikan nasional, tentunya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi yang mampu merefleksikan sebuah kebijakan, khususnya yang berfokus pada pendidikan yang sesuai dengan semangat Pancasila dan UUD 1945, serta selaras dengan tujuan pendidikan nasional.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan pembelajaran wajib yang dilaksanakan mulai dari tingkat pendidikan dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan memiliki tujuan untuk membekali peserta didik nilai-nilai kebangsaan dan pemahaman komperhensif mengenai wawasan nusantara, ketahanan nasional, hak dan kewajiban sebagai warga negara, demokrasi, konstitusi serta HAM dalam menghadapi perkembangan arus globalisasi demi eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Kewarganegaraan berfokus

pada upaya membentuk warga negara Indonesia menjadi pancasilais, sehingga mampu mengamalkan partisipasi publiknya (Nanggala, 2020)

Sifat keilmuan dari Pendidikan Kewarganegaraan yang interdisipliner, multidisipliner, dan transdisipliner menjadi tentunya strategis dan realistis untuk membantu negara guna mewujudkan tujuan nasionalnya. Terlebih yang berfokus pada pendidikan dan kesejahteraan. Kariadi (2016, hlm. 18) menegaskan Pendidikan Kewarganegaraan merupakan kajian ilmu pengetahuan yang sifatnya interdisipliner, multidisipliner, bahkan transdisipliner, guna menyelesaikan kompleksnya permasalahan sosial. Tentu, dalam konteks kebijakan merdeka belajar, idealnya keilmuan tersebut, menjadi acuan dalam melakukan analisa ilmiah, sekaligus evaluasi strategis, sehingga meminimalisir ketimpangan, antara cita-cita dan realitas.

Masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana konsep merdeka belajar dari perspektif Pendidikan kewarganegaraan. Penelitian ini bertujuan untuk (1)mendeskripsikan konsep dan makna merdeka belajar, (2) peran guru dalam merdeka belajar di sekolah dasar. Diharapkan penelitian ini membantu guru untuk lebih memahami konsep dasar merdeka belajar dan perannya dalam mengimplementasikan merdeka belajar dalam kegiatan pendidikan. Dengan pemahaman tersebut guru memperoleh kemerdekaan baik dalam mendesain pembelajaran maupun dalam implementasi dan penilaian pembelajaran. Guru yang memiliki kebebasan dalam pembelajaran akan memfasilitasi siswa untuk merdeka dalam belajar sehingga mencapai hasil belajar yang diharapkan.

METODE

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka bertujuan mengumpulkan data atau informasi yang terdapat di perpustakaan untuk dijadikan sebagai dasar kegiatan penelitian (Raihan, 2017). Studi Literatur atau kepustakaan yang peneliti gunakan pada penelitian ini yakni buku, artikel jurnal, prosiding, dan laporan penelitian sebagaimana tercantum dalam daftar pustaka. Sedangkan data dianalisis dengan analisis konten (*content analysis*) Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan dan setelah pengumpulan data. Teknik analisis data merujuk pada Fraenkel dan Wallen dalam Sari & Asmendri (2020) yang meliputi merumuskan tujuan yang ingin dicapai, mendefinisikan konsep-konsep penting, mengkhususkan unit yang dianalisis, mencari data yang relevan, membangun rasional atau hubungan konseptual data-data yang dikumpulkan untuk menyajikan data. Hasil penelitian disajikan secara deskriptif sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Merdeka Belajar Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Dimensi Kurikuler.

Salah satu peran Pendidikan kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler adalah membentuk “*Good And Smart Citizen*” . Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler, berfokus pada kegiatan pembelajaran. Fokus pada dimensi tersebut merupakan bagian dari upaya dalam membentuk warga negara yang

baik dan cerdas. Landasan pengetahuan, pemahaman, serta pembentukan moral untuk membentuk warga negara yang bersedia berpartisipasi dalam kepentingan umum, memiliki kepekaan sosial, turut andil dalam menjaga persatuan nasional, serta mengisi kemerdekaan melalui peran aktifnya.

Winataputra dan Budimansyah (Nurdin, 2016) mengungkapkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi kurikuler, bertujuan untuk mengoptimalkan potensi peserta didik, agar menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, demokratis dan berkomitmen.

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara sekolah sebagai wahana pengembangan warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yang secara kurikuler Pendidikan Kewarganegaraan yang harus menjadi wahana psikologis-pedagogis yang utama. Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas) Pasal 4 yakni :

- 1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa.
- 2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.
- 3) Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
- 4) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

5) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.

6) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Jika dikorelasikan dengan salah satu karakteristik kurikulum merdeka yakni P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), tentu antara amanat pada Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 4 dengan P5 memiliki visi yang sama, dimana P5 itu sendiri merupakan pembelajaran lintas disiplin ilmu untuk mengamati dan merenungkan solusi terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Konsep Profil Pelajar Pancasila memiliki maksud tujuan membentuk pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, dengan enam ciri utama: beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis.

Dapat disimpulkan bahwa, antara konsep merdeka belajar pada kurikulum merdeka dengan Pendidikan kewarganegaraan dimensi kurikuler memiliki kesesuaian tujuan, dimana dalam konsep pelaksanaannya secara psikologis-pedagogis bertujuan untuk menciptakan kemerdekaan dan keterbukaan pembelajaran. Selain itu, kurikulum merdeka mensimulasikan sebuah konsep belajar yang tidak kaku dalam menentukan konten pembelajaran. Guru dan peserta didik diajak untuk menyesuaikan konten-konten pembelajaran yang relevan dengan

permasalahan yang sesuai dengan kultur dan kebutuhan peserta didik.

Konsep Merdeka Belajar Dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan Dimensi Sosio-Kultural.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam dimensi sosio-kultural, berfokus pada upaya memberdayakan masyarakat. Tentu sebagai keilmuan yang memiliki tugas berat, karena membentuk kepribadian warga negara. Pendidikan Kewarganegaraan menjadi kajian yang luas tidak terbatas sebagai pembelajaran di sekolah saja, namun juga dalam lingkungan masyarakat, baik sebagai pendidikan demokrasi bagi masyarakat, maupun menjadi kajian dalam menganalisis dan merefleksikan dinamika, fenomena, realitas yang terjadi dimasyarakat.

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki masyarakat yang heterogen. Masyarakat yang semakin lama semakin heterogen tentu akan menimbulkan berbagai perbedaan kelompok sosial di dalamnya. Diversitas sosiokultural merupakan bagian yang muncul dari perbedaan yang ada di dalam masyarakat, selain daripada etnis, ras, gender, agama, perbedaan usia, perbedaan bahasa, dan perbedaan ekonomi. Dalam hidup bermasyarakat hendaklah dijaga supaya tidak terjadi gesekan antara perbedaan-perbedaan tersebut. Jika gesekan terjadi, maka akan mendatangkan konflik yang dapat merusak integrasi bangsa. Apalagi, dewasa ini informasi semakin terbuka, arus globalisasi semakin pesat dengan kemajuan teknologi yang ada.

Dalam kurikulum merdeka saat ini, konsep pembelajaran berdiferensiasi menjadi salah satu konsep yang

dilaksanakan, yakni suatu pendekatan sistematis untuk merancang kurikulum dan instruksi pembelajaran bagi siswa yang memiliki keberagaman kemampuan, minat, dan gaya belajarnya. Pembelajaran berdiferensiasi berangkat dari kebutuhan anak. Dalam hal ini tugas guru adalah melayani kebutuhan belajar anak yang berbeda beda dengan cara menerapkan pembelajaran yang berbeda kepada anak, baik dari segi materi, pendekatan, metode, model pembelajaran, bahkan asesmen (Mariati Purba, 2021).

Dalam kurikulum merdeka, penerapan pembelajaran berdeferensiasi menjadi sebuah alternatif bagi guru untuk memfasilitasi berbagai keberagaman peserta didik agar mereka belajar sesuai dengan kebutuhannya. Dalam prinsip belajar berdeferensiasi guru harus memahami dan menyadari bahwa untuk memahami materi pembelajaran tidak bisa hanya dilakukan dengan satu cara, satu, metode, satu strategi, dan lainnya. Guru perlu menyusun berbagai strategi, pendekatan, model, yang diikuti dengan kegiatan dan tugas tugas yang bervariasi.

Konsep Kurikulum Merdeka antara Teori dan Harapan

Dari semua konsep dan program yang dimiliki Kurikulum Merdeka, asumsi utama merdeka belajar adalah memberi kepercayaan kepada guru untuk pelaksanaannya. Guru tidak dapat hanya memainkan satu peran dalam merdeka belajar, namun harus memiliki berbagai peran dalam mendesign, melaksanakan, dan mengevaluasi proses kegiatan belajar mengajarnya. Merdeka belajar adalah kemerdekaan berpikir dimana esensi kemerdekaan berpikir ini harus ada di guru terlebih dahulu (Priatma, 2020). Penerapan kebijakan merdeka belajar

menguatkan berbagai peran guru dalam proses pembelajaran. Salah satu peran seorang guru dalam kurikulum merdeka ialah inovasi pembelajaran. Inovasi pembelajaran diharapkan dapat menciptakan iklim pembelajaran yang memerdekakan peserta didik. Memerdekakan peserta didik dalam hal merdeka berpikir, merdeka berinovasi, belajar mandiri dan kreatif, serta proses belajar yang membahagiakan peserta didik. Secara spesifik, kebijakan merdeka belajar memiliki implikasi terhadap peran guru baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran yaitu , guru yang berkarya dalam tulus, guru yang genuine, guru yang memiliki prinsip the power of ngeureueuh, (sustainable) guru yang ber- DNA sebagai guru (Yoga, 2020).

Selain itu, Kurikulum merdeka memiliki program yang diberi istilah Sekolah Penggerak dan Guru Penggerak. Dari diksi “penggerak” yang digunakan, tentu peran sekolah terutama guru menjadi fokus utama dalam pelaksanaan semua konsep yang dibentuk.

Dapat disimpulkan bahwa, untuk mensukseskan kurikulum merdeka, seorang guru harus memiliki kesiapan dan kemauan dalam bertransformasi untuk melakukan inovasi-inovasi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan belajar. Secara spesifik, kebijakan merdeka belajar memiliki implikasi terhadap peran guru baik dalam pengembangan kurikulum maupun dalam proses pembelajaran.

KESIMPULAN

Konsep Kurikulum merdeka, memiliki kesesuaian dengan keilmuan Pendidikan Kewarganegaraan, khususnya pada aspek dimensi kurikuler dan sosio-kultural. Tentu realitas ilmiah

tersebut, perlu dioptimalkan sebaik dan sebijaksana mungkin, sebagai upaya pemenuhan hak-hak kemerdekaan belajar pada peserta didik, pemberdayaan masyarakat, menyelesaikan masalah kompleks yang ada dimasyarakat, juga sebagai upaya modernisasi pendidikan melalui guru yang inovatif. Dalam bentuk pembelajaran pada kurikulum merdeka, yaitu P5 dan pembelajaran berdiferensiasi, perlu diperhatikan kembali relevansinya dengan tujuan filosofis nasional, atau diberikan indikator jelas pada tujuan dan pelaksanaannya. Keterlibatan aktif peserta didik dan dukungan penuh dari guru serta lingkungan sekitar, agar merdeka belajar terlaksana sesuai tujuannya. Faktanya transformasi guru menjadi guru yang inovatif harus menjadi landasan ilmiah dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam penentu keberhasilan konsep kurikulum merdeka itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

- Ainia, D. K. (2020). Merdeka Belajar Dalam Pandangan Ki Hadjar Dewantara dan Relevansinya Bagi Pengembangan Pendidikan Karakter. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(3), 95–101. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.23887/jfi.v3i3.24525>
- Hardi, Etmi & Mudjiran. (2022). Diversitas Sosiokultural Dalam Wujud Pendidikan Multikultural, Gender, dan Pendidikan Berdiferensiasi. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(6), 8931-8942.
- Kariadi, D. (2016). Revitalisasi NilaiNilai Edukatif Pendidikan Kewarganegaraan untuk Membangun Masyarakat Berwawasan Global Berjiwa Nasionalis. *Jurnal PIPSI: Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia*. 1 (1). Hlm. 14-23.
- Mariati Purba, dkk. (2021). Prinsip Pengembangan Pembelajaran Berdiferensiasi (Differentiated Instruction). Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Riset, kebudayaan dan Teknologi.
- Nanggala, A. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan Sebagai Pendidikan Multikultural. *Jurnal Soshum Insentif*. 3 (2). Hlm. 197-210.
- Nurdin, Encep Syarief. (2016). Analisis Konten Dimensi Implementasi Kebijakan Publik Pada Konten Kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan Di Perguruan Tinggi. *Sosiohumanika*, 9(1).
- Priatma, J. E. (2020). Merdeka Berpikir. *KOMPAS* 6 Pebruari, 6.
- Raihan. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta.
- Republik Indonesia. (2003) .Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas
- Sari, M., & Asmendri. (2020). Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA*, 6(1), 41–53. <https://ejournal.uinib.ac.id/jurnal/i>

ndex.php/naturalscience/article/view/1555/1159.

Yoga, M. (2020). Merdeka Belajar, Belajar Merdeka. Pikiran Rakyat, 14 Maret, 14. <http://disdikbb.org/news/merdeka-belajar-belajar-merdeka/>